

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Insiden banjir besar melanda Pulau Sumatra dalam 26 November 2025, dengan dampak terhebat terasa di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat serta wilayah-wilayah sekitarnya. Diidentifikasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa faktor utama kejadian ini adalah guyuran hujan ekstrem yang melanda berbagai daerah di Sumatra, yang dipicu oleh pembentukan dan perkembangan sistem siklon tropis sertabitik siklon di sekitar Selat Malaka dan Laut Sulu (Utama, 2025). Sebagai pendukung analisis, rekapitulasi dampak bencana banjir tersebut berdasarkan data yang dikumpulkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 24 Desember 2025 disajikan secara terperinci pada tabel 1.1.

**Tabel 1. 1 Laporan Akibat Banjir Sumatra per 24 Desember 2025**

<b>Data</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Status</b>
Korban jiwa	1.113	Meninggal
Korban jiwa	175	Hilang
Korban jiwa	7.000	Terluka
Rumah	158.096	Rusak
Fasilitas Umum	1.900	Rusak
Fasilitas Kesehatan	200	Rusak
Fasilitas Pendidikan	875	Rusak
Rumah Ibadah	806	Rusak
Gedung/Kantor	291	Rusak
Jembatan	734	Rusak
Kabupaten/Kota	52	Terdampak

Sumber: (Geoportal Data Bencana Indonesia - BNPB, 2025)

Data tabel 1.1 mengungkapkan bahwa dampak negatif bencana banjir dan landslide meliputi tiga sektor utama. Dari sektor ekonomi, terjadi kerusakan infrastruktur yang menghambat roda perekonomian. Dari aspek sosial, mata pencaharian masyarakat menjadi terganggu atau hilang sama sekali. Sementara dari perspektif ekologis, lingkungan mengalami penurunan kualitas akibat degradasi lahan, rusaknya keseimbangan ekosistem, serta meningkatnya kerentanan terhadap bencana susulan.

Pemerintah menggugat enam perusahaan sekitar area banjir untuk mengganti biaya pemulihan lingkungan (Purnama, 2026). *Green accounting* dengan proyeksi biaya lingkungan diperlukan untuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan untuk menjadi bukti keseriusan perusahaan dalam operasionalnya (Ni & Wayan, 2025)

Kondisi hutan yang dialihkan menjadi perluasan lahan perkebunan terutama kelapa sawit menunjukkan bahwa hutan telah kehilangan fungsi utamanya sebagai tempat menyerap air. Mengacu Undang-Undang No 41 Tahun 1999 terkait kehutanan, hutan didefinisikan sebagai ekosistem holistik yang melingkupi suatu kawasan lahan tertentu dan memuat sumber daya hayati, dengan vegetasi berkayu sebagai komponen esensial, di mana seluruh unsurnya berinteraksi secara sinergis dan membentuk kesatuan yang tak terpisahkan. Menurut laporan BPS Indonesia, (2025) ada 16.013.039 ha luas perkebunan kelapa sawit. Tersebar di 29 Provinsi, dengan rincian 559.572 ha milik negara, 8.577.445 ha milik swasta, dan 6.876.022 ha milik rakyat.

Pertambahan lahan kebun sawit menjadi bukti, banjir disebabkan buruknya ekosistem hulu sungai. Deforestasi merupakan suatu kondisi menurunnya luas tutupan hutan yang terjadi akibat adanya perubahan fungsi lahan, yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, kawasan permukiman, aktivitas pertanian, kegiatan pertambangan, serta pengembangan sektor perkebunan (Wahyuni & Suranto, 2021).

Perusahaan sektor perkebunan sawit membentuk tulang punggung baru ekonomi di Indonesia, karena memiliki nilai jual yang tinggi di perdagangan internasional, terutama dalam produk turunan *Crude Palm Oil* (CPO). Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu subsektor andalan perekonomian Pulau Sumatra karena sektor ini banyak menyerap tenaga kerja, penghasil devisa, penggerak ekonomi rakyat, dan produk domestik bruto (Rifa'i, 2025). Hal ini menciptakan dilema etis antara sebagai bentuk penggerak ekonomi, namun di sisi lain mengubah ekologis, dapat mengancam keseimbangan alam dan keberlanjutan usaha itu sendiri.

Akibat dari banjir, gerakan tanah, dan penebangan hutan yang dilakukan oleh perusahaan sektor perkebunan kini menjadi tanggung jawab mereka atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Dalam konteks hukum dan kebijakan kontemporer, badan usaha perkebunan dimintai pertanggungjawaban atas dampak ekologis yang bersumber dari operasionalnya (Sarni et al., 2023). Adanya fenomena ini, investor melihat nilai perusahaan sekarang bukan hanya dari kinerja keuangan melainkan ditambah dengan pengungkapan kinerja lingkungan perusahaan. Kinerja

lingkungan bisnis didefinisikan sebagai serangkaian upaya sistematis yang dilakukan perusahaan untuk mengelola serta mengurangi dampak negatif kegiatan operasional terhadap lingkungan, yang mencakup pengurangan jejak karbon, peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan pengelolaan limbah secara berkelanjutan (Daromes & Kawilarang, 2020). Keterbukaan dalam penyajian laporan lingkungan mampu meningkatkan kepercayaan investor, karena hal ini menggambarkan pengelolaan risiko yang optimal sekaligus komitmen terhadap keberlanjutan. Kredibilitas ini dalam akhirnya memudahkan perusahaan dalam mengamankan modal dengan biaya yang lebih kompetitif (Putri & Dewi, 2025).

Penyampaian informasi ESG yang lebih terbuka berperan dalam meningkatkan keberlanjutan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan dalam pengungkapan dimensi ESG mampu mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. (Aydoğmuş et al., 2022). Instrumen *Environment, Social, and Governance* atau ESG merupakan kerangka evaluasi non-keuangan yang bersifat holistik untuk mengukur efektivitas korporasi dalam ranah lingkungan, tanggung jawab sosial, serta sistem manajemen internal. Implementasi strategi ESG yang kohesif terbukti secara empiris mampu mengoptimalkan nilai merek dan memperkuat posisi tawar perusahaan dalam ekosistem investasi global (Melinda & Wardhani, 2020). Selaras dengan Brandon et al., (2021) yang menyatakan bahwa tuntutan permintaan informasi berfokus dalam efisiensi tata kelola risiko dan peluang perusahaan sesuai pilar ESG.

*The Climate Disclosure Standards Board (CDSB)*, merupakan sebuah konsorsium internasional merancang kerangka kerja untuk membantu perusahaan menggabungkan data risiko dan peluang lingkungan dalam laporan keuangan untuk optimalisasi transparansi bagi investor (CDSB, 2022). Melalui penerapan standar tertentu, CDSB memberikan dorongan bagi perusahaan agar mengungkapkan aspek lingkungan dan sosial dalam laporan yang disampaikan. Upaya ini secara tidak langsung menekan perusahaan untuk bersikap lebih terbuka, khususnya dalam konteks transparansi pelaporan keuangan (Adow, 2024). CDBS memberi rekomendasi untuk mengikuti *Green Accounting Standards (GAS)*, pendekatan ini difokuskan dalam pencatatan dan pengukuran berbagai biaya serta konsekuensi lingkungan yang muncul dalam penerapan metode akuntansi reguler (Dhar et al., 2022).

*Green accounting* sangat diperlukan di era sekarang dalam membangun perusahaan yang bersih dan berkelanjutan. *Green accounting* bukan sekadar tren moda, melainkan kebutuhan strategis bagi perusahaan yang berkeinginan mempertahankan relevansinya di tengah desakan global terkait isu lingkungan dan keterbukaan informasi. Dalam praktiknya, *green accounting* berperan dalam pencatatan dan pelaporan biaya yang timbul dari upaya pengelolaan lingkungan. Informasi mengenai biaya lingkungan selanjutnya dimanfaatkan oleh pihak manajemen dalam mengambil keputusan strategis serta diinformasikan kedalam para pemangku kepentingan (Ratmono et al., 2023). Penelitian yang dikemukakan

oleh Agyemang et al., (2023) berhasil dibuktikan dengan bukti empiris terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengungkapan akuntansi lingkungan disertai kinerja lingkungan perusahaan.

Penerapan *green accounting* berkaitan dengan tanggung jawab korporasi terhadap aspek sosial atau disebut dengan *Corporate Social Responsibility*. Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat dalam umumnya.

Pemerintah mendorong perusahaan untuk transparan soal dampak lingkungan dari kegiatan usaha mereka. Pada 1995, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) agar perusahaan memenuhi standar pengelolaan lingkungan sesuai regulasi yang berlaku. PROPER mengakui perusahaan yang mengelola lingkungan sesuai ketentuan hukum. Program ini juga mewujudkan keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup menggunakannya sebagai instrumen prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan.

Penelitian terdahulu Ratmono et al., (2023) menjelaskan bahwa pengaruh positif terhadap CSR ditunjukkan oleh *green accounting* dan kinerja

lingkungan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan (Kraus et al., 2020) menegaskan bahwa kinerja lingkungan mempengaruhi CSR. Didukung (Darsono et al., 2024) mengungkapkan *green accounting* dan kinerja lingkungan berpengaruh dalam CSR. Menurut Hanif et al., (2020) berpendapat kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif kedalam CSR. Berbeda dengan Yun et al., (2023) mengatakan pengungkapan kinerja lingkungan tidak mempengaruhi CSR. Sejalan dengan Adyaksana *et al.* (2020) tidak ditemukan pengaruh *green accounting* terhadap kinerja lingkungan. Inkonsistensi temuan penelitian sebelumnya membentuk *research gap* mendorong dilakukannya penelitian kembali terkait *green accounting* dan pengaruhnya terhadap CSR dalam perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.

Penerapan *green accounting* dapat mengendalikan efek negatif dampak dari kegiatan operasional perusahaan terhadap lingkungan, melalui identifikasi, pengakuan dan analisa transaksi khususnya yang berkaitan lingkungan (Deswanto, 2022). Kinerja lingkungan yang baik berdasarkan pengolahan limbah, kepatuhan regulasi, dan pengelolaan sumber daya. Pengungkapan *green accounting* biaya lingkungan melalui klasifikasi tipe mampu mengoptimalkan kinerja lingkungan perusahaan (Aniela, 2012). Pengungkapan CSR yang baik salah satunya dengan kinerja lingkungan yang baik.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan urgensi dalam bagian latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Apakah *green accounting* berpengaruh terhadap kinerja lingkungan perusahaan perkebunan kelapa sawit sektor *consumer non-cyclicals* subsektor produk agrikultur dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?
2. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit sektor *consumer non-cyclicals* subsektor produk agrikultur dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?
3. Apakah kinerja lingkungan dapat memediasi *green accounting* terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan perkebunan kelapa sawit sektor *consumer non-cyclicals* subsektor produk agrikultur dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh *green accounting* terhadap kinerja lingkungan dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit sektor *consumer non-cyclicals* subsektor produk agrikultur dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kinerja lingkungan terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perusahaan perkebunan

kelapa sawit sektor *consumer non-cyclicals* subsektor produk agrikultur dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.

3. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah kinerja lingkungan dapat memediasi *green accounting* terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit sektor *consumer non-cyclicals* subsektor produk agrikultur dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoretis**

Diharapkan penelitian ini memberikan bukti empiris tentang pengaruh *green accounting* terhadap *Corporate Social Responsibility* dengan mediasi kinerja lingkungan dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit sektor *consumer non-cyclicals* subsektor produk agrikultur dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024. Kemudian dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait *green accounting* dan memberi dasar pertimbangan bagi yang membutuhkan terkait informasi lingkungan dan standard pelaporan keberlanjutan di Indonesia.

#### **2. Manfaat Praktisi**

##### **1. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini ditujukan sebagai sumber informasi tambahan bagi pemerintah mengenai pengaruh *green accounting* terhadap *corporate social responsibility*. Oleh sebab itu diharapkan bisa membantu pemerintah untuk

mengetahui seberapa pentingnya penerapan *green accounting* bagi perusahaan dan pengambilan keputusan untuk kebijakan baru yang akan ditetapkan.

## 2. Bagi Perusahaan

Sebagai pembantu kebijakan internal perusahaan dalam rangka bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Hal ini dapat membuat reputasi sangat baik bagi perusahaan karena penilaian masyarakat dan taat terhadap ketetapan hukum yang berlaku. Kemudian, memperjelas biaya lingkungan yang harus dikeluarkan dalam praktik operasional perusahaan.

## 3. Bagi Akademisi

Temuan dari penelitian berharap dijadikan sumber data, dan bahan refleksi perkembangan penelitian berikutnya. Selain itu dapat digunakan sebagai bahan kurikulum yang relevan, serta menambah literasi keberlanjutan dalam dunia pendidikan.

## 4. Bagi Peneliti

Berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bukti empiris, bahan referensi tambahan, dan literasi pengetahuan dalam penelitian selanjutnya tentang pengaruh *green accounting* terhadap *corporate social responsibility* dengan kinerja lingkungan sebagai mediasi dalam sektor perusahaan perkebunan.

## 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian *penelitian*.

### **BAB II LANDASAN LITERATUR**

Bagian ini berisi landasan teori, yakni prinsip dasar dan konsep dalam memecahkan masalah tugas akhir serta bahasan penelitian terdahulu atau sebelumnya. Ditambah rancangan kerangka pemikiran yang selanjutnya disusun sebagai hipotesis untuk mendapatkan gambaran penelitian yang jelas.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bagian ini berisi kerangka pelaksanaan riset dan pendekatan sistematis yang diterapkan untuk mengevaluasi objek kajian. Komponen ini berisi spesifikasi variabel, penentuan populasi dan sampel, klasifikasi sumber data, hingga instrumentasi teknik dan pengumpulan analisis data yang valid.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini memaparkan komprehensif terkait objek kajian disertai analisis kritis serta argumentasi dalam untuk menjawab rumusan masalah. Bagian ini menjadi sarana untuk menguraikan desain, model, atau system yang dikembangkan sebagai kontribusi praktis dalam penyelesaian kendala yang diteliti.

## **BAB V KESIMPULAN**

Bagian ini berisi simpulan penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.